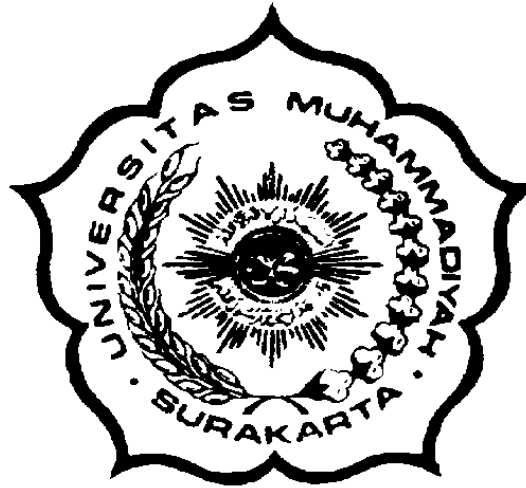


**PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP
KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
(STUDI KASUS DI DPPKAD SUBOSUKAWONOSRATEN)**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

ABDIEL JANITRA

B200110058

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul :
**PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP
KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (Studi kasus
di DPPKAD SUBOSUKAWONOSRATEN).**

Yang di tulis oleh :



ABDRIEL JANITRA

NIM : B 200 110058

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut memenuhi syarat untuk di terima.

Surakarta, Desember 2015

Pembimbing Utama




(Dr. Erma Setiawati, SE. MM. Ak)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis




(Dr. Priyono, SE. M.Si)

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi (dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan) terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Penelitian ini menggunakan Faktor Keperilakuan Organisasi sebagai Variabel Independen dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sebagai Variabel Dependen. Adapun populasi yang digunakan sebagai sampel adalah pegawai di DPPKAD kabupaten/kota di SUBOSUKAWONOSRATEN.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada calon responden atas pertanyaan yang berhubungan dengan Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keperilakuan organisasi (dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan) berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Untuk meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah maka semua pihak yang ada dalam instansi perlu menyadari pentingnya kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah tersebut, dan perlu meningkatkan dukungan atasan yang mendukung sepenuhnya dalam mewujudkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah lebih baik dalam suatu instansi.

Kata Kunci : *Dukungan atasan, Kejelasan tujuan, Pelatihan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.*

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of behavioral factors Organization (supervisor support, clarity of purpose and training) of the Regional Financial Accounting System utilities. This study uses behavioral factors as the Organization of Independent Variables and Regional Financial Accounting System For Dependent Variables. The population is used as a sample is an employee in DPPKAD districts / cities in SUBOSUKAWONOSRATEN.

This study uses a type of field research, with the type of data used are primary data obtained by distributing questionnaires to potential respondents on questions relating to the organization with Behavioral Factors Influence Of Regional Financial Accounting System utilities.

The results showed that the behavioral organization (supervisor support, clarity of purpose and training) significantly affects the area of financial accounting system usability.

To improve the usefulness of financial accounting system area then all those who are in authority need to realize the importance of the usefulness of the financial accounting system of the area, and the need to increase support supervisor, clarity of purpose and training that fully support in realizing the usefulness of financial accounting system area better within an agency.

Keywords: Support boss, clarity of purpose, Training and Regional Financial Accounting System.

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan reformasi pengelolaan keuangan negara. Paket peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbagai peraturan serta perundang-undangan tersebut diatas diharapkan dapat dijadikan landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan Negara dalam rangka menjadikan *good governance* dan *clean government*.

Pemerintah Daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang di perlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat di percaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal. Dalam rangka menetapkan otonomi daerah dan desentralisasi, Pemerintah Daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi (Sri Dewi Wahyundaru, 2001) dalam Lyna Latifah dan Arifin Sabeni. oleh karena itu diperlukan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang baru untuk menggantikan sistem lama yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang telah di terapkan sejak 1981. Sistem MAKUDA tersebut sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang di perlukan saat ini.

Penelitian yang dilakukan Heri Hidayat (2008) dalam Siti Nurlaela dan Rahmawati tentang Analisis Implikasi Ketidaksesuaian Rancangan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKPD), hasil menunjukkan bahwa sebanyak 38 temuan yang mengindikasikan perbedaan antara aturan (format standart) yang berlaku yaitu PP no 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006, dikarenakan belum menggunakan struktur organisasi baru yang sesuai PP No. 58 Tahun 2005, PP No 47 Tahun 2006 dan Permendagri No 13 Tahun 2006.

Penelitian ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurlaela dan Rahmawati (2010) yaitu untuk mengetahui Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di SUBOSUKAWONOSRATEN. Penelitian ini menguji pengaruh faktor keperilakuan organisasional dalam meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Atas Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006, sejalan dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/079/BAKD Tanggal 12 Februari 2008 hal Pedomanan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dan memberikan gambaran mengenai operasionalisasi penerapannya dalam proses pencatatan akuntansi baik pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) maupun Satuan Kerja Pengguna Anggaran (SKPD). Perbedaannya adalah pada penelitian ini hanya meneliti Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di DPPKAD SUBOSUKAWONOSRATEN, sedangkan penelitian Siti Nurlaela dan Rahmawati (2010) meneliti Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di SUBOSUKAWONOSRATEN dengan variabel *Intervening* melalui konflik afektif dan kognitif.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori

a. Faktor Keperilakuan Organisasi

Perilaku organisasi adalah studi sistematis tentang tindakan dan sikap yang di tunjukkan oleh orang-orang dalam organisasi (Robbins, 2005).

Tampubolon (2004) mengungkapkan perilaku keorganisasian merupakan studi mengenai perilaku manusia dalam organisasi yang mana dengan menggunakan ilmu pengetahuan tentang bagaimana manusia bertindak dalam organisasi. Perilaku organisasi ini mendasar pada analisis terhadap manusia yang di tunjukkan bagi kemanfaatan orang. Secara singkat Luthsan (2005) mengemukakan perilaku organisasi sebagai pemahaman, prediksi, dan manajemen perilaku manusia dalam organisasi.

b. Dukungan Atasan

Dukungan Atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan (Chenhall, 2004). Dukungan atasan juga berpengaruh dalam mendukung suksesnya implementasi sistem baru dan mengembangkan daya inovatif bawahannya.

Menurut Dessler (2008) sebuah organisasi dapat dikatakan solid bila terjadi hubungan dinamis antara karyawan dengan karyawan lain, serta hubungan yang harmonis antara karyawan dengan atasan. Kegiatan atau perilaku bekerja yang saling mendukung satu dengan yang lain akan membentuk kerja sama tim yang solid sehingga tujuan atau sasaran yang hendak di capai dapat direalisasikan dengan baik. Untuk mengukur dukungan atasan maka digunakan indikator yang diadopsi dari Nurlaela (2010) yaitu sebagai berikut:

- a. Partisipasi atasan dalam bekerja, merupakan tindakan nyata dari atasan yang ikut bekerja bersama sama anggota organisasi lainnya.
- b. Motivator yaitu mendorong bawahannya untuk dapat mencapai sasaran yang telah disepakati.
- c. Reward yaitu penghargaan yang diberikan atasan ketika bawahannya dapat mencapai sasaran atau target yang direncanakan.

c. Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di semua level organisasi (Chenhall, 2004). kejelasan tujuan dapat menentukan suatu

keberhasilan sistem karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki.

Menurut Robbins (2003) kejelasan tujuan dalam organisasi pemerintah dapat terlihat dari visi dan misi organisasi terkait. Kegunaan SAKD merupakan bagian dari tujuan organisasi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Menurut Handoko (2001) kejelasan tujuan memperlihatkan transparansi di dalam sebuah organisasi, yang memperlihatkan alur yang harus dilalui atau dicapai seluruh anggota organisasi dalam bekerja. Kejelasan tujuan memperlihatkan keseriusan organisasi dalam mencapai visi demi terjaganya eksistensi organisasi dimasa depan.

d. Pelatihan

Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem (Chenhall, 2004).

Pelatihan (*Training*) bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai ketrampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang. Sehingga dalam melaksanakan pelatihan hendaknya melakukan analisis tentang kebutuhan, tujuan dan sasaran (Husein Umar, 2000).

e. Pengerian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang terdiri atas kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah *input* (masukan) menjadi *output* (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. *Output*-nya adalah laporan keuangan. Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian proses ataupun prosedur, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah. Tahap-tahap dalam siklus akuntansi dimulai dari bukti transaksi, jurnal, posting ke buku besar, membuat neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo, membuat laporan keuangan, jurnal penutupan, dan neraca setelah penutupan. Laporan keuangan, sesuai siklus akuntansi, setelah penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian disusun laporan-laporan keuangan dengan mengambil data neraca saldo setelah penyesuaian. Berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian maka dibuatlah: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan mengacu pada SAP. Dengan catatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tidak mengatur perubahan atas pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Selanjutnya berdasarkan pasal 308 dan pasal 309 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan dan dapat dijadikan pedoman dalam menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan (*general purposes financial statements*), karena sistem akuntansi memberikan landasan tentang prosedur, teknik, dan metode yang

layak untuk merekam segala peristiwa penting kegiatan pemerintah. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan (Hendriksen 2005).

f. Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomis, efektif efisien, dan akuntabel. Indikator yang digunakan untuk mengukur kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut diadopsi dari Nurlaela (2010) adalah sebagai berikut:

- a. *Validity*, informasi yang dihasilkan dalam sistem akuntansi yang digunakan memiliki kandungan akurasi yang tinggi.
- b. *Reability*, informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi adalah informasi yang dapat dipercaya.
- c. Efisien, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat menghemat penggunaan biaya.
- d. Efektif, melalui sistem akuntansi yang digunakan anggota organisasi dapat memanfaatkan waktu secara optimal.

g. Akuntabilitas dan Transparansi

Secara sederhana akuntabilitas (*accountability*) mengandung arti sebagai pertanggungjawaban. Apabila dilihat dari aspek akuntansi dan manajemen pemerintah, Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) mendefinisikan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan saran-saran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik (Rosjidi, 2001).

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik tersebut

meliputi informasi yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektifitas (Mardiasmo, 2006)

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian Siti Nurlaela dan Rahmawati (2010) menganalisis Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di SUBOSUKAWONOSRATEN. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konflik kognitif tidak berhubungan positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Konflik afektif berhubungan negatif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hanya dukungan atasan yang berpengaruh untuk meningkatkan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Penelitian Abdul Rohman (2009) tentang Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan kinerja pemerintah Daerah (survei pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah) penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan intern. Hasil ini mengidentifikasi bahwa implementasi sistem akuntansi dan sistem pengelolaan keuangan daerah dapat mempengaruhi atau memperlancar pelaksanaan fungsi pengawasan intern pada pemda di Jawa Tengah. Selain itu, implementasi pengelolaan keuangan daerah, dan fungsi pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja Pemda.

Penelitian Lyna Latifah dan Arifin Sbeni (2007) yang meneliti Faktor Keperilakuan Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi empiris pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hanya dukungan atasan saja yang berpengaruh terhadap kegunaan SAKD.

Pengaruh pelatihan dan kejelasan tujuan terhadap kegunaan SAKD tidak berhasil dibuktikan. Konflik kognitif tidak berhubungan positif dengan kegunaan SAKD. Konflik afektif berhubungan negatif dengan kegunaan SAKD.

Penelitian yang dilakukan Muji Mranani dan Beti Lestiorini (2011), tentang Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Konflik Kognitif Dan Konflik Afektif Sebagai Intervening. Hasil penelitian menunjukkan Pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan dan konflik afektif tidak berpengaruh positif terhadap kegunaan SAKD. Pelatihan dan kejelasan tujuan berpengaruh positif terhadap konflik kognitif.

Penelitian yang dilakukan oleh Yati (Agustus 2013 – Januari 2014), tentang Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Pada Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor organisasi seperti kejelasan tujuan, pelatihan dan dukungan atasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegunaan sistem informasi keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Noto Wardoyo (2012) tentang Pengaruh Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keperilakuan organisasi berhubungan signifikan positif terhadap kegunaan sistem akuntansi daerah, konflik kognitif, konflik afektif. Konflik kognitif dan afektif berhubungan signifikan positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Cyntia Carolina (2013) tentang Pengaruh Kejelasan Tujuan Dan Dukungan Atasan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Di Pemerintah Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan tujuan berpengaruh signifikan positif terhadap kegunaan SAKD pada dinas di pemerintah kota Padang dan

dukungan atasan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kegunaan SAKD pada dinas di pemerintah kota Padang.

Penelitian yang dilakukan oleh Wildoms Sahusilawane (2011) tentang pengaruh faktor berperilaku organisasi dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah terhadap kinerja individual studi empiris pada pemerintah kota Ambon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor organisasional seperti pelatihan dan dukungan atasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem informasi keuangan daerah sedangkan faktor kejelasan tujuan tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan utama penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Menurut Nazir. Moh (2003; 54), yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk mengungkapkan variabel-variabel adalah dengan menggunakan skala Likert. Agar data serta informasi yang diperoleh sebagai acuan penelitian ini akurat lengkap, maka pengumpulan data yang dipergunakan penulis dengan menggunakan kuisisioner yang disebarkan kepada objek yang diteliti.

Tahap-tahap dalam menganalisis data adalah data dari responden dibuat tabulasi profil dan jawaban responden melakukan, setelah itu melakukan uji kualitas data, uji asumsi klasik dan menguji hipotesis dengan analisis regresi berganda.

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini sebagai sampel penelitian adalah pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di SUBOSUKAWONOSRATEN sebanyak 105 orang

Analisis deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menyajikan secara ringkas informasi dari data responden mengenai variabel faktor organisasional yang meliputi dukungan atasan, kejelasan tujuan, pelatihan dan kegunaan SAKD. Penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) variabel independen yaitu variabel dukungan atasan (X_1), kejelasan tujuan (X_2), dan pelatihan (X_3), sedangkan sebagai variabel dependen adalah variabel kegunaan SAKD (Y). Data dari keempat variabel tersebut diubah ke dalam suatu bentuk yang dapat menyediakan informasi untuk menggambarkan serangkaian faktor dalam suatu kondisi yang meliputi nilai minimal, nilai maksimal, nilai rata-rata (*mean*), dan nilai standar deviasi. Hasil deskriptif statistik untuk masing-masing variabel penelitian seperti yang disajikan pada tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	n	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
Dukungan Atasan	92	19.00	45.00	32.033	6.008
Kejelasan Tujuan	92	10.00	25.00	16.891	2,838
Pelatihan	92	16.00	34.00	23.837	4.109
Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	92	30.00	45.00	37.587	3.800

Sumber: data primer diolah, 2015

Hasil penelitian untuk variabel dukungan atasan diperoleh data dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh para pegawai di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masing-masing Kota/Kabupaten SUBOSUKAWONOSRATEN, diperoleh skor tertinggi 45 dan skor terendah 19, diperoleh skor rata-rata dukungan atasan 32,033 dan standar deviasi 6,008. Karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi ($32,033 > 6,008$) berarti variabel dukungan atasan terdistribusi normal.

Data hasil penelitian mengenai kejelasan tujuan dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh pegawai di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masing-masing Kota/Kabupaten SUBOSUKAWONOSRATEN, diperoleh skor tertinggi 25 dan skor

terendah 10. Skor rata-rata kejelasan tujuan 16,891 dan standar deviasi 2,838. Karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi ($16,891 > 2,838$) berarti variabel kejelasan tujuan terdistribusi normal.

Data hasil penelitian mengenai pelatihan dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh para pegawai di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masing-masing Kota/Kabupaten SUBOSUKAWONOSRATEN, diperoleh skor tertinggi 34 dan skor terendah 16. Skor rata-rata pelatihan 23,837 dan standar deviasi 4,109. Karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi ($23,837 > 4,109$) berarti variabel pelatihan terdistribusi normal.

Data hasil penelitian mengenai kegunaan SAKD dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh para pegawai di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masing-masing Kota/Kabupaten SUBOSUKAWONOSRATEN, diperoleh skor tertinggi 45 dan skor terendah 30. Skor rata-rata kegunaan SAKD 37,587 dan standar deviasi 3,800. Karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi ($37,587 > 3,800$) berarti variabel kegunaan SAKD terdistribusi normal.

1. Pengaruh Dukungan Atasan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dukungan atasan memiliki nilai t hitung sebesar $3,852 > t$ tabel (1,987) dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 berarti lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa dukungan atasan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga H_1 diterima kebenarannya. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi atasan memberikan dukungan kepada para pegawainya maka para pegawai akan memanfaatkan atau menggunakan SAKD dengan semakin baik pula.

2. Pengaruh Kejelasan Tujuan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kejelasan tujuan memiliki nilai t hitung sebesar $3,621 > t$ tabel (1,987) dengan nilai

probabilitas sebesar 0,000 berarti lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima. Artinya bahwa kejelasan tujuan berpengaruh terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, sehingga H_2 diterima kebenarannya. Hal ini berarti semakin tinggi kejelasan tujuan penggunaan suatu sistem demi kelancaran para pegawai dalam bekerja maka semakin tinggi pemanfaatan/kegunaan SAKD di setiap pemerintah daerah di Kota/Kabupaten SUBOSUKAWONOSRATEN.

3. Pengaruh Pelatihan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pelatihan memiliki nilai t hitung sebesar $7,709 > t$ tabel (1,987) dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 berarti lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa pelatihan sebagai salah satu faktor organisasional berpengaruh terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), itu berarti bahwa hipotesis ketiga diterima (H_3 diterima). Selain itu diketahui bahwa variabel pelatihan dalam penelitian ini memberikan pengaruh yang paling dominan dibandingkan kedua variabel independen lainnya. Sehingga dapat diartikan bahwa para pegawai memberikan persepsi bahwa kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) lebih dipengaruhi oleh faktor organisasional khususnya faktor pelatihan dibandingkan adanya dukungan dari atasan dan kejelasan tujuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dukungan atasan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di SUBOSUKAWONOSRATEN, terbukti dari nilai t_{hitung} sebesar $3,852 > t_{tabel}$ (1,987) ($p=0,000 < 0,05$).
2. Kejelasan tujuan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di SUBOSUKAWONOSRATEN, terbukti dari nilai t_{hitung} sebesar $3,621 > t_{tabel}$ (1,987) ($p=0,000 < 0,05$).

3. Pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di SUBOSUKAWONOSRATEN, terbukti dari nilai t hitung sebesar $7,709 > t \text{ tabel } (1,987)$ ($p=0,000 < 0,05$).

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian lanjutan, yaitu :

1. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan sampel yang lebih banyak dan tidak terbatas pada Dinas di Pemerintahan Kabupaten maupun Pemerintahan Kota saja namun diperluas untuk seluruh Dinas, Kantor dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, agar hasil penelitian dapat digeneralisasi untuk ruang lingkup yang lebih luas sehingga dapat memperkuat validitas eksternal yang dibutuhkan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain, tidak terbatas pada faktor perilaku tapi juga faktor teknis dalam rangka implementasi SAKD perlu untuk diteliti.
3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode tambahan yaitu wawancara secara langsung kepada responden agar responden memberikan jawaban dengan kesungguhan dan keseriusan, serta peneliti lebih terlibat dalam proses penelitian tersebut.
4. Peneliti selanjutnya disarankan perlu melakukan pengembangan instrumen, yaitu disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan dari obyek yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, 2008, Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Aceh, *Thesis*. Universitas Sumatra Utara.
- Bodnar, G.H dan William S., Hopwood (1995). *Accounting Information System*. Prentice Hall International.6th.Ed.

- Carolina, Cyntia. 2013. Pengaruh Kejelasan Tujuan Dan Dukungan Atasan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Pada Dinas di Pemerintah Kota Padang). *Skripsi*. Universitas Negeri Padang
- Dessler garry. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Indonesia. Jakarta: Erlangga
- Hendriksen, M.C. dan B.M.F. Van. 2005, *Accounting Theory*, Ed. New Jersey; Person Education, Inc.
- Ikhsan, Arfan dan M.Ishak. 2005. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat
- Indra Bastian (2002), *Sistem Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.
- Jumali, Teddy & Bambang Supomo. 2002. Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Akuntan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol 5 No.2 Hal. 214-228.
- Latifah, Lyna dan Sabeni Arifin. 2007. Faktor Keperilakuan Organisasi dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *Jurnal SNA X* : Universitas Diponegoro
- Mardiasmo. 2004. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No.1, Hal 1-17.
- Mranani, Muji dan Beti Lestiorini. 2011. Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Konflik Kognitif dan Konflik Afektif sebagai Intervening. *Fokus Ekonomi (FE)*, Desember 2011, Hal. 193 – 203 Vol. 10, No. 3.
- Nordiawan, Deddi. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Nurlaela dan Rahmawati. *Pengaruh Faktor keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. 2010. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Republik Indonesia. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Republik Indonesia. Undang-undang RI. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-undang RI. No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Republik Indonesia. Undang-undang RI. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia. Undang-undang RI. No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Robbins, S. P. 2005. *Organization Behaviour Concept, Controversies and Application*. Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Bussiness II*. Jakarta : Salemba Empat
- Sahusilawane, Wildoms. *Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Dalam Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Individual (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Ambon)*. Thesis. Universitas Terbuka.
- Shield, M. D., and S.M Young. (1995). Behavioral Model for Implementing Cost Management System. *Journal of Cost Management* (Winter), 17:25
- Sri Dewi Wahyundaru. 2001. Akuntansi Sektor Publik dalam Otonomi Daerah. Suara Merdeka. Edisi 21 Februari
- Tampubolon, Manahan P. 2004. *Perilaku Keorganisasian Edisi 1*. Ghalia Indonesia: Jakarta.